

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stewardship

Teori Stewardship (Donaldson dan Davis, 1991). Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada situasi di mana manajemen dimotivasi oleh tujuan individu, melainkan berfokus pada tujuan utama, yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori stewardship didasarkan pada sifat manusia, yaitu kepercayaan, kemampuan untuk bertindak secara bertanggung jawab, integritas, dan kejujuran terhadap orang lain. Dengan kata lain, teori stewardship memandang manajemen berperilaku baik demi kepentingan publik pada umumnya dan para pemangku kepentingan pada khususnya (Daniri 2005).

Menurut (Pemerintah et al., 2022). Teori Stewardship merupakan keadaan dimana manajer sebagai steward lebih memperhatikan kebutuhan publik atau tujuan instansi daripada kehendak pribadinya. Secara teori terdapat korelasi yang kuat antara pencapaian dengan kepuasan sebuah instansi. Menurut teori stewardship, manajer akan bertindak demi kepentingan terbaik kelompok. Ketika pemilik dan steward memiliki kepentingan yang berbeda, steward akan berusaha bekerja sama dengan mereka, alih-alih melawan mereka, karena mereka merasa memiliki kepentingan yang sama. Mengikuti arahan pemilik adalah tindakan yang masuk akal karena stewardship lebih berfokus pada upaya untuk mencapai tujuan organisasi (Wyatt, 2006).

Teori Stewardship dalam penelitian (Aisy, 2024) Teori Stewardship menjelaskan bahwa individu memiliki hubungan perjanjian dengan organisasinya yang mewakili komitmen moral dan mengikat kedua belah pihak untuk bekerja menuju tujuan bersama, tanpa mengambil keuntungan satu sama lain. Sehingga teori dapat digunakan pada organisasi sektor publik yang bekerja tanpa profit dan untuk kepentingan rakyat. Selain itu Teori

Stewardship menunjukkan bahwa manajemen selalu didorong oleh kepentingan organisasi, alih-alih tujuan pribadi. Asumsi filosofi teori ini didasarkan pada kualitas manusia berupa integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta keandalan (Ii & Pustaka, 1991).

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh (Syahara et al., 2024) Penerapan teori stewardship juga mencakup pembentukan struktur tata kelola perusahaan yang kuat, termasuk komite-komite independen, pengaturan remunerasi yang adil, dan sistem insentif yang mendorong tindakan-tindakan yang menguntungkan jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, penerapan teori stewardship dalam *good governance* dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham dan stakeholder lainnya, serta mengarah pada pengelolaan perusahaan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sebagai pelaksana pemerintahan, pemerintah daerah akan bertindak dan bertindak demi kepentingan publik, yaitu kepentingan rakyat, menurut teori ini. Menurut teori stewardship, kepuasan pemilik dan keberhasilan organisasi saling berkaitan erat. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memaksimalkan tata kelolanya. Rakyat, yang merupakan pemilik pemerintah, akan puas dengan kinerjanya jika dapat mencapai tujuan ini (No Title, 2019).

Pada awal perkembangannya, akuntansi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi dan evolusinya dalam organisasi sektor publik, para pimpinan merasa sangat sulit untuk menjalankan tugas-tugas manajemen sendiri. Sangat jelas bagaimana peran kepemilikan dan manajemen berbeda satu sama lain. Akuntansi memainkan peran krusial dalam memastikan kesejahteraan publik dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya pemerintah. Petter Block (1999) dalam tulisannya telah mencoba memberikan suatu pedoman dan konsep pembaharuan bagaimana menerapkan pendekatan stewardship ini. Pendekatan ini menggantikan model kepemimpinan manajerial yang selama ini banyak

dipraktekkan. Langkah-langkah yang diusulkan oleh Block adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan konsep sikap melayani.
2. Membuat kesepakatan tentang pengendalian dan tanggung jawab.
3. Mengadakan pertemuan untuk menginformasikan bagaimana cara kerja, apa rencana bisnis, dan kearah mana anggaran dikembangkan.
4. Menciptakan masa depan yang diinginkan.
5. Melakukan pelatihan manajemen.
6. Membentuk tim pengembang.
7. Mengubah praktik manajemen.
8. Merancang ulang struktur organisasi.,
9. Merancang ulang sistem *reward*.

Prinsipal sebagai bos, melepaskan pengendalian dengan menginginkan adanya timbal balik dari steward untuk berkomitmen pada hasil yang ingin dicapai dan menjunjung tinggi persyaratan organisasi, serta menjaga agar prinsipal tetap mendapatkan informasi dan hidup dengan konsekuensinya. Prinsipal meminta steward berlaku sebagai pemilik. Pertemuan antara semua unsur yang berpengaruh pada organisasi dilakukan untuk merancang masa depan yang diinginkan bersama. Unsur-unsur tersebut mencakup pelanggan , anggota dewan direksi, karyawan semua unit dan tingkat, pemasok, anggota masyarakat, dan pertemuan, manajemen melakukan latihan bersama dalam hal menyusun keahlian tim, manajemen konflik, keahlian komunikasi dan peningkatan proses pekerjaan. Selanjutnya tim pengembang berusaha untuk melakukan terobosan-terobosan dalam hal peningkatan mutu, efisiensi biaya, dan lebih memperhatikan kepuasan pelanggan, pemasok, dan lingkungan sosial. Prinsip-prinsip pembaharuan dalam pengelolaan organisasi sektor publik dalam perspektif stewardship mutlak diperlukan untuk mencapai *good gorvenance*. Beberapa karakteristik steward yang dikemukakan oleh Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997) yang mempreposisi bahwa orang yang lebih cocok menjadi steward dalam mengembangkan hubungan prinsipal steward adalah orang yang :

1. Termotivasi oleh tingkat kebutuhan yang tinggi dan termotivasi oleh faktor intrinstik.
2. Memiliki indentifikasi yang tinggi dan komitmen yang tinggi pada organisasi.
3. Menggunakan *personal power* dalam mempengaruhi orang lain.
4. Berada dalam situasi yang berorientasi partisipasi/keterlibatan.
5. Berada dalam budaya yang menganut paham kolektivisme dan budaya rentang kekuasaan yang rendah.

Faktor-faktor psikologis dan situasional perlu diidentifikasi lebih jauh melalui pendekatan-pendekatan empiris untuk menjelaskan teori *stewardship* sebagai suatu paradigma baru dalam pengelolaan organisasi. *Good governance* akan tercipta apabila untuk mencapai tujuan pemerintah, kepentingan semua pihak yang berkepentingan harus seimbang (-Teori-Stewardship-Tinjauan-Konsep-Dan-Im-.n.d.). Teori *stewardship* menawarkan suatu kerangka kerja untuk memahami perilaku manajerial, merancang sistem insentif dan pengawasan yang efektif, serta mempromosikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Penerapan teori *stewardship* dalam konteks akuntansi mengimplikasikan bahwa manajemen harus bertindak sebagai pengurus yang bertanggung jawab dan transparan terhadap para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Syahara et al., 2024).

2.2 Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja atau prestasi kerja berasal dari pengertian "*performance*". Dalam penelitian (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, 2020). Selain itu kinerja merujuk pada evaluasi hasil kerja yang diukur dengan menggunakan kriteria yang sudah disetujui bersama. Di dalam konteks perumusan skema strategis atau perencanaan strategis, kinerja menggambarkan sejauh mana kegiatan, program, atau kebijakan berhasil dicapai dalam mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi dalam periode waktu tertentu (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, 2020).

Menurut (Salamah et al., 2021) Kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang individu atau sekelompok individu dalam suatu

organisasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi secara sah dengan tetap mematuhi hukum serta standar moral dan etika. Kinerja juga dikenal sebagai prestasi kerja, mengacu pada jumlah dan kualitas hasil kerja yang dicapai karyawan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan sudut pandang tersebut, kinerja didefinisikan sebagai keluaran yang dapat dihasilkan oleh individu atau sekelompok individu dalam suatu organisasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi secara sah dengan tetap menjunjung standar moral dan etika. Kinerja pemerintah merupakan ukuran keberhasilan individu maupun organisasi yang dapat dilihat dan diukur secara realitas, dengan kata lain pegawai pemerintah memiliki peran penting dalam organisasi (Pemerintah et al., 2022). Menurut (Ariyandani et al., 2020) kinerja dapat didefinisikan rencana tentang sejauh mana pelaksanaan, program, atau keputusan berhasil mencapai tujuan, fungsi, misi, dan visi yang dirumuskan dalam rencana strategis.

2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran dalam (Anggaran et al., 2021) mengatakan seberapa luas maksud anggaran yang sudah dikukuhkan secara jelas juga spesifik, bisa dengan lebih mudah untuk dipahami oleh kelompok bagian yang menanggung keterlaksanaannya tujuan tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berfungsi untuk mengetahui proses penargetan anggaran yang dirumuskan dengan terperinci, hingga bisa dimengerti oleh pemegang tanggung jawab atas pencapaian target anggaran tersebut. (Ariyandani et al., 2020).

Selanjutnya, Adanya sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah untuk keberhasilan dan juga mempertanggungjawabkan kegagalan pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan tidak terdapatnya pedoman dan acuan dalam bekerja. Implikasi pada penurunan kinerja yang berarti juga dapat dipastikan mengalami penurunan akuntabilitas kinerja dalam Instansi ataupun organisasi. Namun sebaliknya,

jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan secara jelas maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat (Rohmah Putri, 2023). Namun apabila sasaran anggaran tidak memiliki ketidakjelasan Para pelaksana anggaran akan merasa bingung, gelisah, dan tidak puas dengan pekerjaan mereka akibat hal ini. Dengan kata lain, target anggaran yang tidak jelas menciptakan lingkungan ketidakpastian yang membuat kinerja instansi pemerintah tidak akuntabel. (Febriani, 2023).

Menurut Penelitian yang dilakukan ((Febriani, 2023) indikator kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sesuaian rencana kerja dan anggaran RAPBD, merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD yang disesuaikan dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
2. Target anggaran yang jelas dan spesifik. tingkat penetapan target anggaran yang masuk akal bagi individu yang bertanggung jawab atas pencapaiannya.
3. Keahlian dan pengetahuan, tujuan dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran rencana bisnis dan anggaran (RBA).
4. Faktor yang mendukung tujuan instansi, Dua elemen kunci yang dapat secara efektif dan efisien mendukung tujuan lembaga adalah kejelasan target anggaran dan keterlibatan dalam perencanaan anggaran.

2.4 Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Salamah et al., 2021) menjelaskan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memenuhi kebutuhan publik dengan menyediakan layanan publik. Akuntansi sektor publik dan swasta berbeda dalam beberapa hal. Variasi dalam konteks yang memengaruhi akuntansi inilah yang menyebabkan variasi dalam sifat dan karakteristiknya. Akuntansi yang berkaitan dengan keuangan negara, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan segala konsekuensinya, dikenal sebagai akuntansi sektor publik. Akuntansi untuk organisasi nirlaba, juga dikenal sebagai akuntansi

institusional, merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang berfokus pada pendokumentasian dan pelaporan transaksi dari lembaga pemerintah dan entitas nirlaba lainnya, termasuk rumah sakit, yayasan, masjid, badan amal, dan lembaga pendidikan. (Fadillah, 2020).

Menurut Penelitian yang dilakukan (Familia Irene et al., 2024) Kriteria berikut dapat digunakan untuk mengukur siklus akuntansi keuangan sektor publik: (1) Entitas Pelapor; (2) Asumsi Fundamental; (3) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan; (4) Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; (5) Keandalan Informasi yang Relevan dan Andal; (6) Elemen Laporan Keuangan; dan (7) Pengakuan Elemen Laporan Keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan akuntansi sektor publik adalah proses mendokumentasikan, mengkategorikan, mengevaluasi, dan meringkas transaksi keuangan organisasi publik untuk memberikan pengguna data keuangan yang membantu dalam pengambilan keputusan.

2.5 *Good Governance*

Good Governance adalah suatu pengelolaan urusan urusan negara melalui pelimpahan wewenang disemua tingkat baik ekonomi, politik, maupun organisasi (Pokhrel, 2024). Menurut (Familia Irene et al., 2024), menjelaskan Penerapan manajemen dalam pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab serta sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan pasar yang efektif dikenal dengan istilah tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik.

Disampaikan oleh (Marisa, 2022), menjelaskan bahwa untuk dapat menyelenggarakan kepentingan negara, lembaga pemerintahan harus menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak dan peraturan perundang-undangan. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumber daya untuk mewujudkan pembangunan

nasional merupakan salah satu definisi tata pemerintahan yang baik. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa *good governance* adalah pengelolaan pemerintahan berdasarkan kaidah tertentu dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.

2.6 Pengawasan Internal

Pengawasan merupakan sebagai proses untuk menjadikan bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Salamah et al., 2021). Selanjutnya menurut (Familia Irene et al., 2024) Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tujuan tertentu terpenuhi sebaik mungkin atau untuk membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut (Mubarok et al., 2021) Proses pengawasan memastikan tercapainya tujuan organisasi dan operasional sesuai rencana awal. Proses ini juga menunjukkan seberapa erat hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Di sisi lain, pengawasan internal menggambarkan pengawasan oleh unit pengawas di dalam perusahaan.

Selain itu, menurut (Terhadap et al., 2023), pengawasan internal adalah prosedur dan kebijakan yang memastikan bahwa aturan dan peraturan harus diikuti dengan benar, aset dilindungi dari penyalahgunaan, dan informasi perusahaan akurat. Hal ini didukung dalam penelitian (Terhadap et al., 2023) yang membuktikan bahwa sistem pengawasan intern berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintah, khususnya pemerintah kota. Mencegah pemborosan, penyimpangan, penyalahgunaan, kesalahan, hambatan, dan kegagalan dengan mencegahnya sesegera mungkin dalam mencapai tujuan awal dan melaksanakan tugas organisasi merupakan hakikat pengawasan internal. (Mubarok et al., 2021).

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel perbandingan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bella Familia Irene, Iriyadi Iriyadi, David Hasibuan, Windarwaty Saurmauli Pangaribuan ,(2024)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Peangawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan <i>Good Gorvenance</i> sebagai Variabel Intervening	Independen: Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Peangawasan Internal Dependen: Kinerja Instansi Pemerintah Intervening Variabel : <i>Good Gorvenance</i>	Hasil penelitian menyatakan bahwa • Terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan akuntansi sektor publik terhadap <i>good governance</i> pada instansi pemerintah • Bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengawasan internal terhadap <i>good governance</i> pada instansi pemerintah daerah. • Bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan <i>good governance</i> terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. • Bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. • Bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengawasan internal

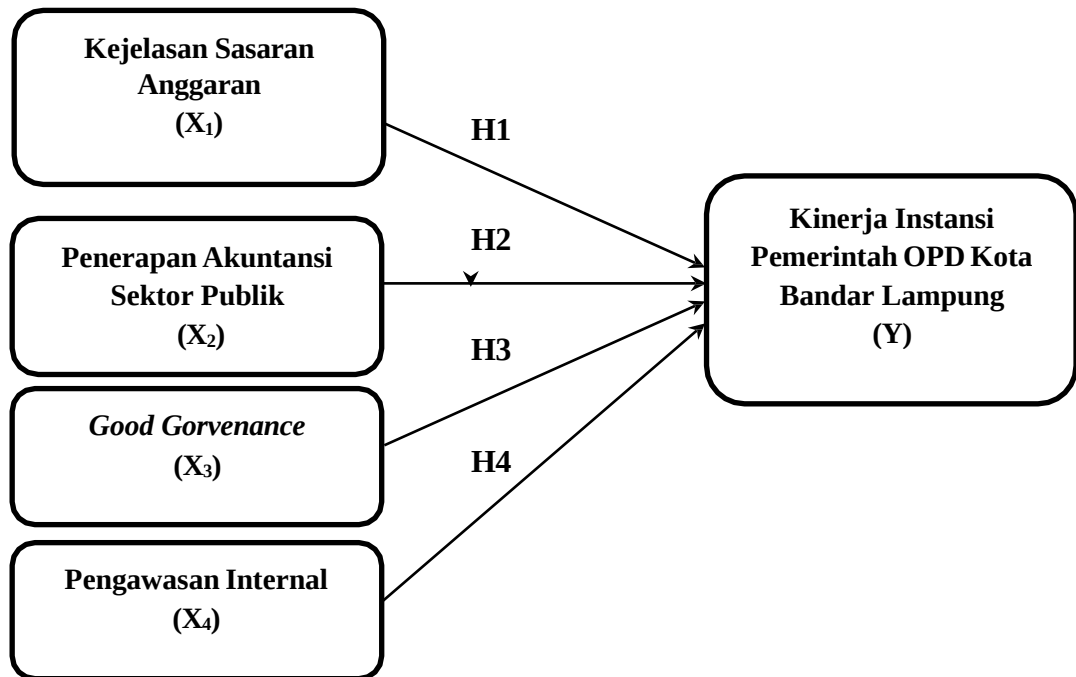
No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. • Bahwa terdapat pengaruh <i>good governance</i> dalam memediasi dari pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah • Bahwa terdapat pengaruh <i>good governance</i> dalam memediasi dari pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.
2	Mohammad Alfen Tadjudinsyah, Astri Fitria, (2023)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Independen: Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Dependen: Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa • Terdapat pengaruh yang signifikan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Koefisien yang dihasilkan positif • Terdapat pengaruh yang signifikan pengawasan internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Koefisien yang dihasilkan positif

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3	Neneng Karlina, Trisna Sary Lewaru, Dwi Kriswantini, (2023)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, <i>Good Governance</i> Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Independen: Penerapan Akuntansi Sektor Publik, <i>Good Governance</i> Dan Pengawasan Internal Dependen: Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penelitian menyatakan bahwa - Bahwa akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, <i>good governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. - Sedangkan sistem pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.
4	Dina Siti Handayani, Ridwan, (2024)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Hasil penelitian menyatakan bahwa - Bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan memegang dampak signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Bahwa secara simultan, kejelasan sasaran anggaran,

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan memegang sebuah pengaruh signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5	Dina Epriliani, (2022)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> , Pengawasan Intern Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Independen: Penerapan <i>Good Governance</i> , Pengawasan Intern Dan Disiplin Kerja Dependen: Kinerja Pemerintah	Hasil penelitian menyatakan bahwa: • Bahwa penerapan good governance berpengaruh terhadap kinerja pegawai satuan kerja perangkat daerah. • Bahwa pengawasan intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. • Bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai • Bahwa penerapan <i>good governance</i> berpengaruh terhadap kinerja pegawai satuan kerja perangkat daerah.

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah OPD Kota Bandar Lampung



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Penelitian sebelumnya (Rohmah Putri, 2023) Agar perencanaan daerah dapat secara efektif mendefinisikan target kinerja, anggaran daerah harus dapat bertindak sebagai standar untuk mencapai kinerja yang diantisipasi. Oleh karena itu perlunya tuntutan atas instansi pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan yang dialami instansi harus dipublikasikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang transparan. Oleh sebab itu, Target anggaran daerah harus tepat, komprehensif, dan mudah dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas anggaran. Kinerja

instansi pemerintah akan meningkat jika target anggaran dijelaskan secara eksplisit. (Febriani, 2023).

Target anggaran yang tidak jelas menimbulkan ketidakpastian, keresahan, dan ketidakpuasan di tempat kerja yang berdampak pada menurunnya kinerja yang pada gilirannya akan menurunkan kinerja organisasi.. Pengendalian akuntansi memberikan kesempatan instansi pemerintah untuk mengontrol dan mengevaluasi semua kegiatan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh instansi tersebut. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Febriani, 2023). Dalam Penelitian (Rohmah Putri, 2023) Menjelaskan bahwa tingkat kejelasan sasaran anggaran dinyatakan secara tepat dan jelas dengan tujuan menjamin tercapainya anggaran, yang dikenal sebagai kejelasan sasaran anggaran. Oleh karena itu, sasaran anggaran daerah harus jelas, spesifik, dan mudah dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan operasional anggaran.

Kinerja instansi pemerintah akan meningkat jika target anggaran dijelaskan secara eksplisit. Dengan demikian, kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh kejelasan target anggaran. (Febriani, 2023). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah ini sejalan dengan penelitian (Rohmah Putri, 2023) yang menyatakan bahwa variable kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka diajukan hipotesis:

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

2.8.2 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Melalui analisis, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan data transaksi, penggunaan akuntansi sektor publik berkontribusi pada peningkatan

kinerja instansi pemerintah. Peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran akan membantu instansi tersebut berkinerja sesuai rencana. (Wiyana et al., 2023). Menyiapkan laporan keuangan dengan klasifikasi akun standar dan mengikuti prosedur pencatatan dan penjurnalan yang selaras dengan sirkulasi bisnis organisasi sektor publik, termasuk laporan akuntansi, perbendaharaan, dan interpretasi, merupakan keuntungan utama akuntansi sektor publik. (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021).

Instansi pemerintah mulai menerapkan akuntansi yang baik dalam harapan dapat membenahi performa instansi pemerintah jadi performa dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintah dapat berjalan dengan baik. Kesimpulannya pemerintah dapat menilai dari informasi keuangan pemerintah dalam membuat keputusan dan terciptanya transparansi dalam publik (Maschuroh & Priono, 2021). Dalam penelitian (Neneng Karlina et al., 2023) menerangkan bahwa akuntansi sektor publik Indonesia berkembang dengan pesat, terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut.

Penerapan akuntansi sektor publik sangat penting karena memiliki banyak manfaat, terutama terkait kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas penerapan akuntansi sektor publik, semakin tinggi pula standar akuntansi sektor publik. Kualitas kinerja yang dihasilkan tentu akan dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan pemerintah. (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021). Hal ini disebabkan, oleh fakta bahwa lembaga pemerintah telah menyusun, mengalokasikan, dan melaksanakan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, serta memberikan hasil keuangan kepada publik. Untuk menjamin akurasi dan akuntabilitas, laporan-laporan ini selanjutnya

diaudit. (Salamah et al., 2021). Berdasarkan hasil Penelitian sebelumnya, maka diajukan hipotesis:

H2: Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

2.8.3 Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Good governance didefinisikan sebagai metode pengelola sumber daya baik secara ekonomi maupun sosial disuatu negara untuk pengembangan masyarakat, *good governance* merupakan pelaksana urusan ekonomi, administratif dan politik dalam menyelenggarakan urusan negara pada semua tingkat (Pemerintah et al., 2022). Pembahasan mengenai pengaruh akuntansi sektor publik terhadap *good governance* di Indonesia telah dilakukan oleh (Familia Irene et al., 2024), yang menyatakan *good governance* dan akuntansi sektor publik memiliki hubungan yang kuat, dimana akuntansi sektor publik sebagai alat untuk melakukan elaborasi *good governance* ke tatanan yang lebih riil. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pembangunannya.

Dalam penelitian (Neneng Karlina et al., 2023) Menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan harus difokuskan pada pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik, yang didefinisikan sebagai "Tata Kelola yang Baik". Konsep tata kelola yang baik muncul sebagai strategi yang berfokus pada pengembangan sektor publik melalui tata kelola yang baik. Kinerja instansi pemerintah dipengaruhi secara positif oleh tata kelola yang baik. Setiap pegawai akan berkinerja baik ketika pemerintah menerapkan tata kelola yang efektif. (Marisa, 2022). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka diajukan hipotesis:

H3: *Good Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

2.8.4 Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Pengawasan internal adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh unit atau aparatur pengawas yang merupakan bagian dari organisasi itu sendiri. Pimpinan organisasi diwakili oleh aparatur atau unit pengawas ini. Aparat ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua informasi dan data yang dibutuhkan organisasi, termasuk informasi tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pekerjaan.. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. (Salamah et al., 2021).

Menurut penelitian (Neneng Karlina et al., 2023) menyatakan bahwa Pengawasan internal dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) guna menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kecurangan terhadap pengelolaan keuangan daerah, Dengan demikian perlu adanya pengawasan untuk memperkecil timbulnya penyimpangan tersebut. Pada. Selain itu pengendalian internal digunakan juga untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hasil yang berpotensi tidak terduga. Selain itu, kontrol internal dapat meningkatkan output, menghentikan kehilangan aset, meningkatkan tingkat kedaulatan data dalam pelaporan keuangan, dan mendorong kepatuhan terhadap undang-undang dan Peraturan saat ini (Terhadap et al., 2023).

Selanjutnya untuk membangun organisasi itu sendiri, unit pengawasan mengawasi pemantauan internal, di mana unit pengawasan dipercaya untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan perusahaan dan beroperasi sesuai dengan arahan dari pimpinan organisasi. (Mubarok et al., 2021). Pengawasan internal, di sisi lain, bertujuan agar satuan-satuan kerja perangkat daerah dapat menyelenggarakan tata kerja birokrasi yang baik, baik secara internal maupun eksternal, mencapai keterpaduan yang maksimal dalam pengelolaan pembangunan

untuk memberikan pelayanan dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang, serta melakukan pengendalian agar penyelenggaraan pemerintahan terlaksana dengan tertib sebagaimana mestinya dan aparat pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya seefektif mungkin.(Salamah et al., 2021). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka diajukan hipotesis:

H4: Pengawasan Internal berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah